

PERAMBAHAN HUTAN DI KAWASAN TAMAN NASIONAL KUTAI: PENELITIAN DI EMPAT DESA DEFINITIF DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

Deforestation In Area Of Kutai National Park: A Research At Four Definitive Villages In East Kutai Regency

Ifan Luthfian Noor ¹ dan Sunyoto Usman ²

Program Studi Sosiologi

Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

ABSTRACT

This research deals with title : " Deforestation in Area of Kutai National Park at Four Definitive Villages : Sangkima, Teluk Pandan, Singa Geweh and Sangatta Selatan, in East Kutai regency - East Kalimantan".

This research is conducted to express and also look for the soybean cake of cause why deforestation still be happened in area of National Park Kutai and know how process of the happening of activity of deforestation in area of Kutai National Park (KNP).

This research involved all farmers or process in making farm and worker of wood sector like worker chainsaw, wood puller, driver of wood delivery truck and owner of sawmill which during this time has dependent irrespective in existence of area of conservation of Kutai National Park economically.

This grounded research uses descriptive-analytic as the method of research instructed for the description of deforestation background in Kutai National Park, cause and process of the happening of deforestation in Area of Conservation of Kutai National Park.

This research indicated that the deforestation and illegal logging in National Park as a result of 4 factors, and these are: height request of wood, decentralization of forest area and forestry blossom, resident accretion, and weakness of law and governmental inconsistency policy

In its process, deforestation and illegal logging in area of conservation of Kutai National Park in the reality involved a lot of party, government, private sector and also society. The involvement is conducted directly and also indirectly with the pattern of deforestation, motivation, orientation, scale and different instrument.

Keyword : *Deforestation, Kutai National Park*

1. *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, Samarinda*

2. *Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta*

PENGANTAR

Latar Belakang

Implikasi dari lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah diantaranya adalah diberikannya kewenangan secara lebih luas dan proporsional kepada daerah untuk mengelola sumberdaya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah, jenis pendapatan yang terutama diperoleh dari Sumber Daya Alam Hutan (SDAH), prosentase dari iuran Hak Pengusahaan Hutan 80 % diberikan kepada daerah, sedangkan pusat hanya memperoleh 20 %, begitu juga dengan provisi sumber daya hutan, daerah berhak memperoleh 80 % sedangkan pusat 20 %.

Sebenarnya desentralisasi dalam bidang kehutanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom, sudah menjabarkan prinsip-prinsip umum pengelolaan hutan yang berkelanjutan (*sustainability*). Dalam prinsip-prinsip umum desentralisasi bidang kehutanan tersebut, telah terkandung pengintegrasian nilai-nilai sosial, ekonomi, ekologis dan sumberdaya hutan bagi kesejahteraan generasi kini dan generasi mendatang. Tetapi sejauh ini upaya tersebut nampaknya belum dilakukan secara optimal, kerusakan hutan terus terjadi dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan nampaknya masih harus terus diperjuangkan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Balai Taman Nasional Kutai diketahui bahwa secara kumulatif areal yang dirambah di Taman Nasional Kutai dari tahun 1999 sampai dengan 2001 menunjukkan peningkatan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Luas Kumulatif (Ha) Hutan yang Dirambah 1999-2001

Daerah Perambahan	Luas Kumulatif (Ha)			Keterangan
	1999	2000	2001	
Taman Nasional Kutai	11.893	16.693	23.712	Lokasi Perambahan teru-tama kanan kiri jalan Bontang-Sangatta dan akan di <i>enclave</i>

Sumber Data : Balai Taman Nasional Kutai

Ishak (2003) mengungkapkan bahwa hutan alam di Indonesia sudah berkurang sampai dengan 72 %, sementara itu hutan yang sedang dalam perusakan adalah seluas 4.000 ha per hari atau 1,46 juta ha pertahun (versi Departemen Kehutanan), 2 juta ha (versi WALHI), atau 2,4 juta ha (versi BAPPEDAL). Dalam kondisi seperti ini, pengelolaan hutan alam secara lestari menjadi semakin sulit dan hal ini berdampak terhadap citra perdagangan hasil hutan Indonesia di pasar internasional. Sementara itu pembalakan liar (*illegal logging*) selama kurang dari 22 tahun telah merugikan Indonesia sekitar 2,8 miliar dollar AS per tahun.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada apa yang telah dideskripsikan pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dikemukakan dan nantinya akan dikaji secara mendalam dalam penelitian adalah :

1. Mengapa masih terjadi perambahan hutan di kawasan Taman Nasional Kutai ?
2. Bagaimana proses terjadinya perambahan hutan di Kawasan Taman Nasional Kutai ?

Kerangka Teoritis

Hutan bagi Indonesia merupakan sumber daya yang penting dalam upaya menjaga kelangsungan pembangunan nasional, karena di samping merupakan sumber kekayaan alam, hutan juga merupakan salah satu basis pertahanan nasional. Untuk itu, hutan di samping dimanfaatkan secara optimal juga harus dipikirkan sekaligus aspek pelestariannya agar hutan tidak habis atau kehilangan daya dukungnya terhadap proses pembangunan.

Menurut Baker (Simon, 1993) hutan dapat didefinisikan sebagai suatu asosiasi masyarakat tumbuh-tumbuhan dan binatang yang didominasi oleh pohon atau vegetasi berkayu, yang mempunyai luasan tertentu sehingga dapat membentuk iklim mikro dan kondisi ekologi yang spesifik.

Berdasarkan klasifikasinya hutan dapat dibagi dalam dua kriteria umum yang cukup dikenal masyarakat yaitu hutan alam dan hutan tanaman. Perbedaan ini mempunyai implikasi perbedaan bentuk pengelolaan kedua macam hutan tersebut. Menurut Davis (Simon, 1993) tujuan pengelolaan hutan adalah untuk memperoleh keuntungan dan nilai yang sebesar-besarnya dari hutan. Namun demikian tujuan utama pengelolaan harus ditentukan oleh sifat pemilikan dan situasi ekonomi secara umum di wilayah hutan yang bersangkutan. Karena pengelolaan

hutan merupakan perkembangan lebih lanjut dari pemungutan kayu dari hutan alam, maka kehutanan berarti mengelola hutan alam tersebut, yaitu memanen pohon yang sudah dianggap masak, diikuti dengan permudaan secara alam, dan kemudian melindungi serta memanen hasil yang baru. (Clawson dan Sedjo, 1984).

Salah satu elemen yang paling penting dalam pengelolaan hutan adalah konsep kelestarian hasil hutan (*sustained yield forestry*). Konsep ini diperkenalkan pertama kali oleh Carlowitz pada tahun 1713 (Simon, 1993) dan (Wiebeck dan Peters, 1984), tetapi baru dikembangkan secara sistematis sejak pertengahan kedua abad 18 di Eropa Tengah.

Speidel (Simon, 1993) dan (Wiebecke dan Peters, 1984) membedakan konsep kelestarian hutan menjadi dua kelompok yaitu kelestarian statik dan kelestarian dinamik. Kelestarian statik adalah penerapan konsep kelestarian hutan mulai dari permulaan sampai pertengahan abad 20, sedangkan kelestarian dinamik adalah konsep kelestarian hutan yang dipakai setelah abad 20. Dalam kelestarian statik, konsep kelestarian hutan dihubungkan dengan pemanfaatan dan keuntungan dalam jenis, nilai, pertumbuhan dan semua dampak pengusahaan hutan. Dalam kelestarian dinamik, konsep kelestarian lebih banyak dikaitkan dengan produksi kayu, penggunaan kayu, menjaga dan meningkatkan produktivitas tempat tumbuh, unit pengelolaan hutan dan semua dampak pengusahaan hutan

Berdasarkan evolusi kelestarian hutan yang berjalan secara berangsur-angsur, Wiebecke dan Peters (1984) merumuskan definisi kelestarian hasil hutan sebagai usaha untuk memudahkan keberlanjutan dan penetapan secara optimal dari semua efek dari hutan baik yang terukur maupun tak terukur yang dipersembahkan demi kepentingan manusia dan generasi mendatang.

Konsep pengelolaan sumber daya publik yang menunjukkan kombinasi derajat intensitas keterlibatan pemerintah di satu pihak dan masyarakat di pihak lain, menghasilkan empat kemungkinan pola pengelolaan (Acheson, 1989), sebagai berikut:

1. Jika pemerintah dan masyarakat sama-sama tidak melakukan kontrol secara intensif terhadap pengelolaan sumber daya, akan menjadikan sumber daya tersebut didayagunakan secara terbuka sebagaimana halnya suatu "sumber daya terbuka"
2. Jika pemerintah melakukan kontrol sepenuhnya terhadap pengelolaan sumber daya, maka akan menghasilkan pola "pengelolaan oleh pemerintah (pola inilah yang selama ini berlangsung di Indonesia). Dalam pola ini, masyarakat

"ditinggalkan" dan dengan demikian masyarakat kehilangan rasa memiliki. Karena itu, masyarakat merasa tidak perlu melakukan upaya-upaya pemeliharaan. Pada akhirnya, pola ini akan terjerumus pada pola (1).

3. Jika masyarakat melakukan kontrol sepenuhnya terhadap pengelolaan sumber daya, maka akan menghasilkan pola "pengelolaan oleh masyarakat." Masyarakat itu sendiri sebenarnya terdiri dari fragmen yang cukup luas : ada masyarakat pengguna dan ada masyarakat di luar pengguna. Ketika masyarakat pengguna melakukan tindakan pengelolaan yang bijaksana kerap terdapat gangguan dari masyarakat lain. Jika gangguan itu meningkat, maka masyarakat pengguna tidak mampu lagi menanggulanginya secara swadaya. Akhirnya, pola ini pun akan terjerumus pada pola (1).
4. Jika kontrol pemerintah dan masyarakat itu sangat besar dan dalam posisi yang sederajat, maka akan menghasilkan pola "pengelolaan kolaboratif." Secara empirik, inilah pola yang ideal.

CARA PENELITIAN

Sebagaimana telah dijelaskan, tujuan penelitian ini adalah mengungkap serta mencari tahu mengapa perambahan hutan masih terjadi di kawasan Taman Nasional Kutai, serta mengungkap proses terjadinya perambahan di kawasan tersebut, maka sifat penelitian ini adalah penelitian mendasar (*grounded research*) yang bersifat deskriptif-analitik.

Penelitian ini akan menggambarkan serta mengeksplorasi penyebab perambahan hutan dan proses terjadinya perambahan di kawasan Taman Nasional Kutai. Metode yang dipilih adalah observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam (*indepth interview*).

Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di dalam maupun di luar kawasan Taman Nasional Kutai, secara lebih spesifik, penelitian ini mencakup atau melingkupi empat desa definitif yang dijadikan *pilot project enclave* yaitu desa singa geweh, sangkima, teluk pandan dan sangatta selatan, yang secara keseluruhan berpenduduk sebanyak 19.794 jiwa. Empat desa tersebut dipilih karena berdasarkan data dari Balai Taman Nasional Kutai, keempat desa tersebut berada pada jalan poros Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur yang membelah kawasan konservasi Taman Nasional Kutai. Alasan lainnya kebijakan *enclave* ditengarai memicu masyarakat di kawasan tersebut melakukan aktivitas perambahan untuk

keperluan perladangan maupun perkebunan. Selain hal tersebut fakta di lapangan menunjukkan bahwa jalan poros Bontang-Sangatta kerap digunakan untuk mobilitas truk pengangkut kayu curian dari kawasan tersebut. Informan dipilih berdasarkan data dari Balai Taman Nasional Kutai dan Polres Kabupaten Kutai Timur Tahun 2002-2003.

Sumber Informasi

Objek penelitian dalam penelitian di bagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1) petani atau penggarap ladang 2) pekerja kayu (*operator chainsaw*, penarik kayu, supir truk) 3) pemilik sawmill.

Informasi lain didapatkan dari tokoh masyarakat, aparat desa, Badan Statistik di Kota Bontang, Pemerintah Kota Bontang dan Sangatta, aktivis lingkungan, petugas Balai Taman Nasional Kutai dan Polsus Kehutanan serta aparat terkait lainnya yang berkepentingan dengan kawasan tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi dan wawancara mendalam. Dokumentasi dan wawancara mendalam digunakan untuk mengetahui lebih lanjut penyebab perambahan hutan di kawasan Taman nasional Kutai dan proses terjadinya. Wawancara juga dilakukan terhadap tokoh masyarakat, aparat desa, petugas Balai Taman Nasional Kutai, Polsus Kehutanan yang bertugas menjaga kawasan tersebut serta pejabat terkait lainnya.

Teknik Analisis Data

Untuk mendapatkan hasil penelitian secara maksimal, metode analisis yang digunakan meramu beberapa alat analisis antara lain wawancara mendalam terhadap informan yang telah ditentukan sebagaimana di atas, melakukan observasi non-partisipasi terhadap kenyataan di lapangan, dan menggunakan data yang didapat dari observasi dan dokumentasi-dokumentasi baik tertulis maupun tidak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manipulasi penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam hutan dilakukan dengan dua pola, yaitu *pertama*, eksplorasi secara bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian hutan, secara teknis pola ini dalam aktivitas penebangan hutan dilakukan dengan memperhatikan konsep perlindungan serta peremajaan hutan seperti TPI

(Tebang Pilih Indonesia) dan TPTI (Tebang Pilih Tanam Indonesia), kemudian melakukan kegiatan reboisasi terhadap hutan. Pola yang kedua, eksplorasi dilakukan secara tidak bertanggung jawab dan orientasinya adalah produksi maksimal untuk keuntungan yang maksimal, hutan diambil manfaatnya tetapi diabaikan kelestariannya, akibatnya kawasan hutan menjadi rusak, mengalami erosi dan tidak produktif lagi. Sekalipun sumber daya alam hutan adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tetapi apabila kondisi ini terus berlanjut, maka diperlukan waktu yang cukup lama untuk memulihkan kondisi hutan tersebut.

Taman Nasional Kutai sebagai kawasan konservasi tidak luput dari aktivitas tidak bertanggung jawab berbagai pihak yang berkepentingan dengan hutan. Hutan di dalam kawasan tersebut dieksplorasi melalui aktivitas penebangan liar dan perambahan. Banyak faktor yang diduga menjadi penyebab tingginya *illegal logging* dan perambahan di kawasan tersebut, faktor-faktor itu antara lain adalah :

Tingginya Permintaan Kayu

Tingginya permintaan terhadap kayu menstimulus banyak pihak untuk berlomba-lomba menebang dan menjual kayu tanpa mengindahkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Logika yang dibangun sebenarnya sangat sederhana yaitu berapapun banyaknya kayu yang akan ditebang bagi pelaku bisnis perkayuan dijadikan jaminan bahwa kayu hasil tebang (log maupun olahan) baik yang diperoleh secara legal atau illegal pasti akan diserap pasar, bagi pasar yang terpenting adalah terpenuhinya permintaan (*demand*) bahan baku kayu. Untuk memperoleh gambaran tentang tingginya permintaan kayu dapat dilihat dari peningkatan produksi kayu (m³) Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2000 sampai tahun 2002 pada tabel 2 :

Tabel 2. Produksi Kayu Kabupaten Kutai Timur Tahun 2000-2002

Jenis Kayu	Produksi (m ³)			Jumlah (m ³)
	2000	2001	2002	2000-2002
Meranti	16.100	21.410	40.020	77.530
Kapur	2.369	3.542	7.193	13.104
Ulin	32.234	40.567	44.318	117.119
Bengkirai	6.542	9.398	16.690	32.630

Sumber Data : Balai Taman Nasional Kutai

Longgena Ginting dari WALHI Pusat (Suara Kaltim, 21 November 2003) dalam siaran persnya menyatakan bahwa kapasitas industri perkayuan saat ini baik yang legal maupun ilegal melebihi 70 juta m³, sedangkan rata-rata produksi kayu bulat tahun 2001-2002 kurang dari 10 juta m³. Artinya diperkirakan lebih dari 60 juta m³ kebutuhan industri disuplai dari sumber-sumber lain yang tidak tercatat secara sah.

Berdasarkan apa yang telah dituturkan di atas, kondisi tersebut dimungkinkan atau disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : a) adanya perizinan industri perkayuan, baik industri hilir maupun izin sah lainnya yang tidak memperhatikan kemampuan *supply* bahan baku, yang diindikasikan oleh kapasitas terpasang sesuatu jenis industri di *set up* sedemikian rupa dengan jumlah besar tanpa memperdulikan dari mana asal bahan baku maupun berapa besar bahan baku yang mampu ter *supply*. Indikasi lainnya adalah tidak semua industri perkayuan mempunyai kepastian *supply* bahan bakunya, karena tidak memiliki lokasi atau areal sendiri; b) bermunculan industri kayu tanpa izin (liar) yang merupakan salah satu alternatif usaha masyarakat dalam mengantisipasi krisis ekonomi. Hal ini diindikasikan oleh aktivitas masyarakat yang hidup berdampingan dengan potensi sumber daya hutan, menebang dan menjual kayu sebagai alternatif termudah dan tercepat menghasilkan uang. Hal ini ditopang dengan munculnya cukong-cukong kayu yang memiliki modal kuat. Indikasi lainnya terjadi akibat kecemburuan masyarakat terhadap pemegang izin yang sah di sektor perkayuan yang selama ini cenderung kurang peduli dengan nasib masyarakat sekitar hutan.

Desentralisasi Bidang Kehutanan dan Pemekaran Wilayah

Sisi positif pemberlakuan desentralisasi bidang kehutanan di era otonomi daerah adalah terbangunnya kemandirian daerah dalam mengelola sumber daya alam hutan yang dimilikinya. Dalam konteks perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999, Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Provisi Sumberdaya Hutan dengan prosentase masing-masing 80 % merupakan modal yang cukup menggiurkan bagi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Selain persoalan desentralisasi bidang kehutanan, sebagaimana diketahui sejak diberlakukannya otonomi daerah banyak bermunculan provinsi, kabupaten dan kota pemekaran. Implikasi dari pemekaran suatu wilayah tentunya berimbas terhadap ketersediaan lahan bagi pembangunan infrastruktur dan supratruktur daerah pemekaran tersebut. Dalam konteks ini sebelum Desentralisasi Bidang Kehutanan

diberlakukan, Taman Nasional Kutai berada di wilayah Kabupaten Kutai, tetapi ketika Kabupaten Kutai di pecah menjadi 4 wilayah Kabupaten Kota yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang, Taman Nasional Kutai akhirnya diapit oleh keempat Kabupaten Kota tersebut.

Pemekaran suatu wilayah dan pembangunan infrastruktur wilayah tersebut terpaksa harus mengorbankan Taman Nasional Kutai. Kebijakan *enclave* sendiri awalnya ditentang oleh aktivis lingkungan dan berdasarkan rencana tata ruang tersebut apa yang selama ini dikhawatirkan menjadi kenyataan. Sebab saat ini saja selain luas areal yang ditambah mengalami peningkatan setiap tahunnya, laju kerusakan hutan di kawasan ini juga cukup memprihatinkan akibat maraknya *illegal logging*.

Pertambahan Penduduk

Selain pencurian kayu (*illegal logging*) kawasan Taman Nasional Kutai terutama di sepanjang poros jalan Bontang Sangatta sejak lama dihuni oleh masyarakat yang mengandalkan penghidupan mereka dari hasil hutan ikutan atau berladang, tetapi dengan maraknya aktivitas *illegal logging* sebagian dari mereka ada yang berubah profesi menjadi penyenso (operator *chainsaw*), pekerja sawmill, penarik kayu bahkan penadah kayu-kayu hasil olahan untuk kemudian dijual ke kota terdekat. Jumlah penduduk di kawasan tersebut dari tahun ketahun semakin bertambah apalagi di sekitar pemukiman mereka berdiri industri besar berskala nasional. Tekanan jumlah penduduk di kawasan tersebut mengakibatkan kawasan konservasi Taman Nasional Kutai semakin terancam keberadaannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3 berikut :

Tabel 3. Jumlah Penduduk 4 Desa Definitif di Kawasan Taman Nasional Kutai

No	Desa Definitif	Jumlah Penduduk	
		2001	April 2002
1.	Sangatta Selatan, Singa Geweh, Sangkima dan Teluk Pandan	18.821	19.794

Sumber Data : Balai Taman Nasional Kutai 2002

Data di atas menunjukkan bahwa untuk April 2002 jumlah penduduk pada 4 desa definitif mengalami peningkatan. Hal ini menarik

karena hanya dalam kurun waktu empat bulan sejak tahun 2001 jumlah penduduk pada 4 desa definitif tersebut bertambah menjadi 973 jiwa.

Usman (1998) menyatakan bahwa sedikitnya ada dua faktor penting yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Faktor yang pertama adalah pesatnya peningkatan jumlah penduduk. Hampir di semua belahan bumi ini, jumlah penduduk semakin padat. Kepadatan itu menambah beban yang amat berat bagi lingkungan karena daya dukung sumber alam ternyata semakin tidak seimbang dengan lajunya pemenuhan kebutuhan hidup. Lingkungan tidak pernah berhenti dieksplorasi dengan berbagai macam cara dan argumentasi. Faktor lain yang juga merisaukan bagi usaha menjaga kelestarian lingkungan adalah perkembangan industri.

Pesatnya peningkatan jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang dapat mempercepat kerusakan lingkungan, di Indonesia tingkat pertumbuhan penduduk semenjak tahun 80-an rata-rata berkisar sekitar 2,4 % per tahun, kemudian antara tahun 2000 sampai dengan 2026 jumlah pertumbuhan penduduk di Indonesia rata-rata 3,5 juta jiwa per tahun, Ishak (2003) memperkirakan pada kurun waktu tersebut setiap tahunnya dibutuhkan tambahan lahan seluas 450 ha, atau sekitar 11,7 juta ha selama 26 tahun. Kemudian diprediksikan antara 2026 sampai dengan 2035 pertumbuhan penduduk mengalami penurunan berkisar sekitar 2 juta jiwa per tahun, dan luas lahan yang dibutuhkan adalah seluas 300 ha per tahun, sehingga pada kurun tersebut dibutuhkan lahan seluas 2,7 juta ha. Selanjutnya, untuk kurun waktu 2035 sampai dengan 2046 pertumbuhan penduduk diprediksikan kembali mengalami penurunan dan diperkirakan hanya berkisar 1 juta jiwa per tahun. Sementara luas lahan yang dibutuhkan per tahunnya juga mengalami penurunan sekitar 150 ha per tahun, sehingga dalam kurun waktu tersebut diperlukan tambahan lahan seluas 1,67 juta ha. Berdasarkan prediksi laju pertumbuhan penduduk tersebut apabila diakumulasikan, maka kebutuhan lahan sampai dengan 2046, adalah seluas 16,05 juta ha yang mau tidak mau harus dipenuhi dari lahan alami seperti hutan dan kawasan alam lainnya.

Lemahnya Supremasi Hukum dan Inkonsistensi Kebijakan Pemerintah

Upaya-upaya penanganan hukum terhadap kasus *illegal logging* dan perambahan hutan di Indonesia berdasarkan fakta di lapangan tidak pernah dapat dituntaskan. Oknum pemodal, cukong kayu bahkan aparat yang selama ini memperoleh keuntungan berlipat dari aktivitas *illegal logging* sulit untuk disentuh jerat hukum. Hal itu disebabkan berbagai

alasan, seperti tidak lengkapnya berita acara pemeriksaan (BAP), bukti yang kurang cukup, maupun tidak adanya saksi yang menguatkan tuntutan hukum. Bersamaan dengan itu, vonis pengadilan dalam kasus *illegal logging*, walaupun ada, hanya mampu menjerat para cukong kelas teri atau masyarakat. Karena itulah tindakan hukum dalam kasus *illegal logging* tidak sampai menimbulkan efek jera pada pelakunya.

Terkait dengan persoalan pemanfaatan sumber daya alam hutan, pemerintah kerap tidak konsisten. Hutan bisa saja berubah fungsi dan peruntukannya dalam kurun waktu yang tidak pasti. Dalam konteks ini kita dapat melihat bahwa kawasan konservasi seperti Taman Nasional terus mengalami penyusutan karena fungsinya berubah menjadi hutan produksi dan modus operandinya adalah dengan menerbitkan izin HPH baru bagi pengusaha yang bergerak di sektor kehutanan.

Bukti inkonsistensi kebijakan pemerintah juga terlihat ketika daerah pengguna (umumnya provinsi di Pulau Jawa) menerapkan kebijakan pemutihan kayu baik kayu *log* maupun kayu olahan. Kebijakan ini secara tidak langsung ikut memberikan kontribusi terhadap laju kerusakan hutan di daerah penghasil. Dalam konteks ini kayu-kayu (*log* maupun kayu olahan) yang tidak jelas asal usulnya atau merupakan kayu-kayu hasil *illegal logging* yang tiba di pelabuhan tujuan di sejumlah provinsi di pulau Jawa, oleh kebijakan pemerintah setempat "diputihkan" untuk selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah atau provinsi tersebut "diproses" kembali menjadi kayu-kayu yang "legal".

Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa perambah berdasarkan tipologinya, dapat di bagi menjadi tiga kelompok besar yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Ada beberapa persamaan dan perbedaan yang cukup menonjol dari ketiga tipologi tersebut. Persamaan yang paling menonjol terlihat dari pola perambahan yang dilakukan, baik pemerintah, swasta dan masyarakat hampir semua melakukan kegiatan penebangan. Yang membedakan adalah peruntukannya, umumnya penebangan yang di lakukan pemerintah adalah untuk perluasan wilayah dan pembangunan. Pihak swasta melakukan penebangan untuk aktivitas produksi (membuat kayu *log* dan kayu olahan) dan masyarakat menebang untuk pemukiman dan perkebunan.

Keuntungan finansial adalah motivasi utama yang diharapkan dari aktivitas yang mereka lakukan. Perbedaannya justru terletak pada orientasinya, pemerintah melakukan aktivitas tersebut berorientasi pada pemulihan ekonomi dan peningkatan devisa negara. Pihak swasta berorientasi pada profit atau perolehan keuntungan semaksimal mungkin. Masyarakat melakukan penebangan berorientasi pada

pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*) dan mengharapkan kompensasi atas lahan yang mereka garap.

Kebijakan baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, Surat Keputusan, Izin konsesi HPH, perubahan status kawasan dan pinjam pakai kawasan, merupakan instrumen yang kerap digunakan pemerintah dalam aktivitas perambahan. Instrumen tersebut juga sekaligus memberikan legalitas atas aktivitas yang dilakukan pemerintah. Pihak swasta dalam aktivitasnya menggunakan instrumen atau peralatan seperti peralatan berat (buldozer), *chainsaw*, *sawmill* dan truk pengangkut kayu sedangkan masyarakat biasanya menggunakan *chainsaw* dan peralatan yang masih sederhana lainnya seperti kampak atau parang.

Penebangan dalam skala besar biasanya dilakukan oleh pihak pemerintah dan swasta. Hal ini tentunya mempercepat laju degradasi hutan karena penebangan dalam skala besar selain mengurangi potensi hutan dan jenis kayu yang terdapat di dalamnya juga merusak ekosistem yang ada dalam kawasan tersebut. Berbeda dengan masyarakat yang hanya menebang dalam skala terbatas, di mana jumlah kayu yang ditebang disesuaikan dengan kebutuhan luas areal yang akan dijadikan pemukiman atau perkebunan.

Rusaknya hutan di Indonesia adalah sebuah sejarah panjang ketidakberesan pengelolaan sumber daya alam hutan yang melibatkan banyak pihak dengan beragam kepentingan. Tuduhan yang dialamatkan kepada penebang liar (*illegal logger*) tidak sepenuhnya benar. Apabila ditarik ke belakang kita akan melihat bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dua hal mendasar, yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

KESIMPULAN

Perambahan dan *illegal logging* di kawasan Taman Nasional Kutai terjadi karena disebabkan oleh 4 faktor dominan yaitu:

Faktor pertama adalah tingginya permintaan akan kayu. Sekalipun harga kayu setiap tahun mengalami kenaikan, tetapi permintaan akan kayu setiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan jumlah produksi kayu setiap tahunnya yang dihasilkan di kabupaten Kutai Timur. Berkenaan dengan perambahan dan *illegal logging*, Tingginya permintaan akan kayu tersebut disebabkan karena kayu legal sulit diperoleh dan produksi kayu secara illegal dinilai merupakan alternatif yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pasar. Tidak dipersoalkannya sumber atau asal pasokan juga turut mendorong perambahan dan *illegal logging* di kawasan Taman Nasional Kutai. Selain

itu, tingginya permintaan kayu tersebut secara tidak langsung membuka kesempatan oknum aparat melakukan praktek kolusi dengan pengusaha sektor perikanan

Faktor kedua adalah desentralisasi di bidang kehutanan dan pemekaran wilayah. Prosentase yang diperoleh daerah dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Provisi Sumberdaya hutan sebesar masing-masing 80 %. Secara tidak langsung mendorong pemerintah daerah melakukan eksploitasi sumber daya alam hutan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akibatnya kerusakan hutan sejak pemberlakuan desentralisasi bidang kehutanan jauh lebih parah dari era sebelumnya. Dalam hubungannya dengan pemekaran wilayah, kawasan Taman Nasional Kutai yang dulunya berada di bawah otoritas pemerintah Kabupaten Kutai, sekarang berada di bawah otoritas empat Kabupaten/Kota yang baru dimekarkan. Kebutuhan akan lahan pemukiman, perkantoran, industri dan pembangunan sarana prasarana di wilayah pemekaran tersebut mengakibatkan luas Taman Nasional Kutai semakin berkurang hal ini secara tidak langsung turut mempercepat laju kerusakan hutan di kawasan tersebut.

Faktor ketiga adalah pertambahan penduduk. Pertambahan jumlah penduduk di 4 desa definitif dalam kawasan Taman Nasional Kutai mendorong dibukanya pemukiman baru untuk masyarakat di kawasan tersebut, kebutuhan akan kayu untuk membangun perumahan dan lain-lain juga mengalami peningkatan. Selain itu tidak bisa dipungkiri bahwa pertambahan penduduk juga ikut mendorong dibukanya areal baru untuk industri, perdagangan dan perkantoran.

Faktor keempat adalah lemahnya supremasi hukum dan inkonsistensi kebijakan Pemerintah. Penegakkan hukum yang berkaitan dengan *illegal logging* masih lemah dan tidak membuat pelakunya jera. Aparat penegak hukum cenderung kolusif dan lebih berpihak pada kepentingan pengusaha. Kondisi ini semakin diperburuk dengan sikap pemerintah yang inkonsisten dalam hal kebijakan serta kecenderungan pemerintah untuk berpihak pada kepentingan pengusaha dan pemerintah sendiri.

Proses terjadinya perambahan dikawasan Taman Nasional Kutai bermula dari banyaknya pihak yang terlibat dan berkepentingan dengan kawasan tersebut baik pemerintah, pengusaha maupun masyarakat. Keterlibatan mereka dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan pola perambahan, motivasi, orientasi, skala dan instrument yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Awang, S. 2003. *Politik Kehutanan Masyarakat, CCSS dan Kreasi Wacana*, Yogyakarta
- Balai Taman Nasional Kutai. 2001. *Statistik Balai Taman Nasional Kutai 2001*. BTNK, Bontang.
- Balai Taman Nasional Kutai. 2001. *Laporan Tahunan Balai Taman Nasional Kutai 2001*. BTNK, Bontang.
- Dietz, Ton. 1998, *Hak Atas Sumber Daya Alam*, Kerjasama Pustaka Pelajar, INSIST dan Remdec, Yogyakarta.
- Duerr, et. Al, 1979, *Forest Resource Management, Decision Making Principles and Cases*, W.B. Saunders Company, Philadelphia, ix-612
- Ishak, Awang Farook, 2003, *Paradigma Hutan Lestari dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal*, Indomedia, Jakarta
- Iskandar, Untung, 2001. *Kehutanan Menapak Otonomi Daerah*, Debut Press, Yogyakarta.
- Mitchell, Bruce, 2000, *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Simon, H. 1993. *Hutan Jati dan Kemakmuran Problematika dan Strategi Pemecahannya*, Aditya Media, Yogyakarta
- Usman, S., 1998, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta